

**PARADOKS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA ANTARA
PEMIDANAAN DENGAN REHABILITASI DALAM
PERSPEKTIF TUJUAN PENEGAKAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh

Syahrir Kuba

201810117001



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Paradoks Penegakan Hukum Terhadap
Penyalahguna Narkotika Antara Pemidanaan
Dengan Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan
Penegakan Hukum

Nama Mahasiswa : Syahrir Kuba

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117001

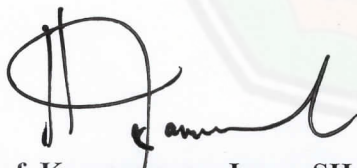
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juni 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Koespartomo Irsan, SH, SIK, MM, MBA
NIP : 019509001



Dr. Drs. Chairuddin Ismail, SH, MH.
NIP : 200912002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Paradoks Penegakan Hukum Terhadap
Penyalahguna Narkotika Antara Pemidanaan
Dengan Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan
Penegakan Hukum

Nama Mahasiswa : Syahrir Kuba

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810117001

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal lulus Ujian Skripsi : 2 Juli 2020

Bekasi, 2 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Prof. Dr. M. S Tumanggor.,H, M.Si. CTA.
NID : 011912090

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH.
NID :010803017

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIP : 2001450

MENGESAHKAN,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH.S.Pd.MH

NIP. 1901378

Dr.Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH., MM

NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrir Kuba
NPM : 201810117001
TTL : Makassar, 20 Januari 1953
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Paradoks Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Antara Pemidanaan Dengan Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan



Syahrir Kuba

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syahrir Kuba
NPM : 201810117001
TTL : Makassar, 20 Januari 1953
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PARADOKS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA ANTARA PEMIDANAAN DENGAN REHABILITASI DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PENEGAKAN HUKUM”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan



Syahrir Kuba

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini sampai dengan penulisan laporan hasil penelitian yang terwujud dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini berjudul: Paradoks Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Antara Pemidanaan Dengan Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum.

Inti skripsi ini ingin menggambarkan Paradoks Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika, sebab asumsi penulis bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim terhadap Penyalahguna Narkotika masih lebih mengedepankan Pemidanaan Penjara dengan mengesampingkan pemberian Rehabilitasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik materi maupun penyusunannya, sehingga tanpa bimbingan, pengarahan dan petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak terutama oleh Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA, selaku pembimbing I, Dr Drs. Chairuddin Ismail, SH., MH selaku Pembimbing II.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kearifan.

Kepada keluarga penulis, yaitu isteri tercinta Hj.Darnawaty, dan yang tersayang ananda Syahrinawaty SE.Msi, Moch Rahmadhyan, SH, dan Moch Satrio Prawiro, serta kedua orang tua yang sangat saya hormati H.Kuba (Alm) dan Hj.Bodong (Alm) serta kedua mertua yang tiada henti-hentinya memberikan support dengan penuh kasih sayang, pengertian yang penuh ketulusan dan pengorbanan yang tidak ternilai hingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jaya telah membantu dan menyediakan berbagai fasilitas selama Penulis mengikuti Pendidikan S1 Ilmu Hukum hingga penyelesaian hasil penelitian ini.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta jajarannya, yang telah membantu dan menyediakan berbagai fasilitas selama Penulis mengikuti Pendidikan S1 Ilmu Hukum hingga penyelesaian hasil penelitian ini.
3. Bapak Jantarda M Hutagalung, SH., M.Pd.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan perkuliahan.
4. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum yang telah banyak membantu Penulis selama mengikuti Pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Kepada para Narasumber dan semua pihak yang telah dengan tulus menyampaikan banyak informasi atau memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga hasil penelitian ini dapat terselesaikan, Amin.

Jakarta , Juni 2020

Penulis



Syahrir Kuba

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	7
1.3.Rumusan Masalah.....	7
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian	8
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis	9
1.6. Kerangka Konseptual	13
1.7. Kerangka Pemikiran	15
1.8. Sistematika Penulisan	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Pengertian Narkotika	21
2.2. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika	22
2.2.1. Heroin atau Putaw	22
2.2.2. Morphine atau morfin	22
2.2.3. Cocaine atau Kokain	22
2.2.4. Ganja	23
2.2.5. Ekstasi (Xtc Atau Mdma)	23
2.2.6. Shabu-Shabu	23
2.3. Bahaya Kecanduan Narkotika	24
2.4. Narkotika Perusak Generasi Muda	26
2.5. Teori Negara Hukum	27
2.5.1. Persamaan di hadapan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>).....	27
2.5.2. Peradilan yang berimbang (<i>Fair Trial</i>).....	30
2.6. Teori Tujuan Penegakan Hukum	32
2.6.1 Ajaran Konvensional.....	33
2.6.2. Ajaran Modern	35
2.7. Teori Tujuan Pidana	37
2.7.1. Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan	37
2.7.2. Teori Kontemporer	38
2.8. Penyalahgunaan Narkotika dan Penanganannya	44
2.8.1. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika	44

2.8.2. Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	50
2.9. Dasar Pembeneran Eksistensi Pidana Penjara Dilihat Dari Sudut Efektivitas Sanksi.....	60
BAB III : METODE PENELITIAN.....	63
3.1. Jenis Penelitian	63
3.2. Pendekatan Penelitian	63
3.3. Sumber Bahan Hukum	64
3.3.1. Bahan Hukum Primer	65
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	65
3.3.3. Bahan Hukum Tersier	66
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	66
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	67
3.6. Lokasi Penelitian.....	68
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
4.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara kepada Penyalahguna Narkotika Tanpa Memberi Kesempatan Untuk di Rahabilitasi dikaitkan dengan Tujuan Penegakan Hukum	69
4.1.1. Kasus Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan.....	69
4.1.2. Penahanan Tersangka/Terdakwa.....	72
4.1.3. Pendampingan oleh Penasehat Hukum.....	84
4.1.4. Dakwaan Penuntut Umum	92
4.1.5. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.....	107
4.1.6. Pertimbangan dan Putusan Hakim	113
4.2. Dampak Penjatuhanan Pidana Penjara kepada Tersangka Penyalahguna Narkotika tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan	152
4.2.1. Lembaga Pemasyarakatan menjadi Over Kapasitas	152
4.2.2. Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan	160
4.2.3. Masa Depan Generasi Muda	166
4.2.4. Menjadi Penjahat Baru dalam Kasus lain	169
4.2.5. Mempercepat Penularan Penyakit HIV/AIDS	170
BAB V PENUTUP	172
5.1. Simpulan.....	172
5.2. Saran	172

DAFTAR PUSTAKA

MOTTO

ILMU ITU DIDAPAT DENGAN 6 MODAL:

“KECERDASAN,

SEMANGAT,

SABAR,

BIMBINGAN GURU,

MENDALAMI DAN

LAMANYA WAKTU.”

(Imam Asy Syafii)



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
RUTAN	Rumah Tahanan Negara



ABSTRACT

Syahrir Kuba, 201810117001, *The Paradox of Law Enforcement related to Narcotics Abuse Between Criminal Conviction and Rehabilitation in Perspective of the Objectives of Law Enforcement*

The Republic of Indonesia is a country that based on the rule of law which protects all of the Indonesian people. The phenomenon that occurs in Indonesia today is the increasingly widespread circulation of narcotics. As a result, there are victims of narcotics abuse among the community, including senior high school students and college students, who are sentenced to imprisonment by the Judge by referring to Article 127 section (1) a, without considering Article 127 section (2) and section (3) that related to the provision of rehabilitation. This condition make pre-abusers must be confined within the Correctional Institution of 41.252 people (16.9%). This situation, according to the author, is become a paradox as related to the promulgation of Law Number 35 Year 2009 about Narcotics which should prioritize the measure of rehabilitation for thenarcotics abusers.

According to the author, The above paradox needs to be traced through research on various factors that influence with the purpose of knowing, analyzing and understanding the consideration of District Court Judges when impose sentences on narcotics abusers without giving them opportunities to be rehabilitated. if we related it to the law enforcement purposes, including the imprisonment of narcotics abuse as a defendant without giving an opportunity to be rehabilitated to the purpose of punishment. Research conducted by the author in the context of writing this essay, is to use the juridical-normative research method combined with empirical juridical methods.

All narcotics suspects or defendants have been detained since the process of investigation, prosecution and trial, and not accompanied by legal counsel, then indicted by the Public Prosecutor using Article 111 and Article 112 as well as Article 127 section(1) a, finally the judge was sentenced the suspects or defendants to a prison sentence with refer to Article 127 section (1) of Law Number 35 Year 2009. Without considering the recommendation of the Integrated Assessment Team for rehabilitation. The conclusion of the judge's judgment in passing the verdict is still illustrated paradoxically, in which the judge prioritizes the imprisonment without considering the provision of rehabilitation facilities, the impact of this verdict is the increasing number of narcotics/drug abusers who are residents of the prison, resulting in over capacity and the increasingly circulation of narcotics/drug in the prison also mental damage and can growing a new criminal, thus eliminating the future of young generations that involved in narcotics/drugs abuse.

Keywords: *Paradox, Law Enforcement, Narcotics Abusers, Punishment with Rehabilitation*

ABSTRAK

Syahrir Kuba, 201810117001, *Paradoks Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Antara Pemidanaan Dengan Rehabilitasi Dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum*

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah peredaran narkotika semakin marak, sehingga muncul korban penyalahguna narkotika dari kalangan masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa, yang kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Hakim dengan mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a, tanpa mempertimbangkan pasal 127 ayat (2) dan Ayat (3) terkait pemberian rehabilitasi, sehingga para penyalahguna harus meringkuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai narapidana. Berdasarkan data Kemenkumham pada tahun 2018 cukup banyak narapidana pengguna narkotika yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan yakni 41.252 orang (16,9%). Kondisi ini menurut penulis menjadi Paradoks terkait diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya lebih mengedepankan pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika.

Paradoks tersebut diatas menurut penulis perlu dilakukan penelusuran melalui penelitian terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan penegakan hukum. termasuk dampak penjatuhan pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika sebagai terdakwa tanpa memberi kesempatan untuk di rehabilitasi bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan skripsi ini, adalah menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif di padukan dengan metode Yuridis Empiris

Tersangka atau terdakwa penyalahguna Narkotika semuanya ditahan sejak proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, serta tidak didampingi penasehat hukum, kemudian didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 111 dan 112 serta pasal 127 ayat (1) huruf a. akhirnya oleh Hakim dijatuhi hukuman pidana penjara dengan mengacu pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk dilakukan rehabilitasi, Kesimpulan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih tergambar paradoks, dimana hakim lebih mengedepankan penjatuhan hukuman pidana penjara tanpa mempertimbangkan pemberian rehabilitasi, sehingga berdampak pada semakin banyaknya penyalahguna narkoba yang menjadi penghuni Lapas, mengakibatkan terjadi over kapasitas dan semakin maraknya peredaran narkotika dalam Lapas serta merusak mental dan bisa menjadi penjahat baru, sehingga menghilangkan harapan masa depan generasi muda yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Paradoks, Penegakan hukum, Penyalahguna narkotika, Pemidanaan dengan rehabilitasi